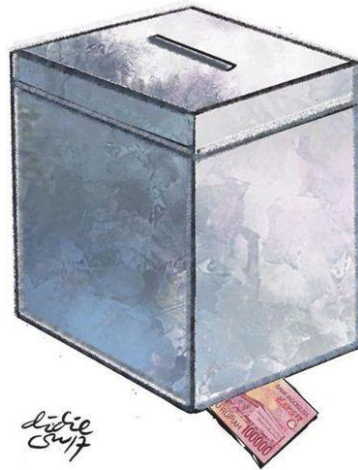


# Demokrasi Setengah Kamar

ARIE PUTRA

Kompas.com - 22/01/2018, 11:38 WIB



Ilustrasi(KOMPAS/DIDIE SW)

**DALAM** studi-studi demokrasi, isu mahar politik hampir tak tersentuh secara mendalam. Meski orang-orang yang pernah terlibat di dalam proses pemilihan sudah saling paham, namun pemain politik masih jarang secara terbuka mengungkapkan isu tersebut ke ruang publik.

Padahal, jika para pihak mau jujur mengakui, ketika seorang bakal kandidat mulai berkomunikasi dengan pengurus partai di tingkat kabupaten/kota, topik pembiayaan untuk memperoleh perahu sebenarnya sudah mulai diembuskan.

Ada berbagai istilah yang biasanya digunakan oleh para perantara politik, mulai dari uang pendaftaran, uang keseriusan, hingga yang terbaru ada pula istilah uang harga diri.

Mahar politik tidak hanya menyasar kandidat nonkader partai politik, tetapi juga kader partai. Bahkan tak jarang mereka dituntut untuk ikut menyelesaikan urusan mahar dengan bakal calon.

Setelah dibayarkan, semua kembali seperti biasa, seperti ada kesempatan diam-diam untuk tidak mengganggu transaksi semacam itu pernah terjadi.

Di tengah kegaduhan antara La Nyalla Mattaliti, yang gagal menjadi calon gubernur Jawa Timur, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, misalnya, paling tidak ada tiga hipotesis utama yang menjelaskan kenapa isu mahar politik yang tadinya hanya

berkembang dari mulut ke mulut berubah menjadi topik perdebatan vulgar di ruang publik.

Baca juga : [La Nyalla Kesal Dimaki Prabowo soal Uang Rp 40 M, Fadli Zon Sebut Miskomunikasi](#)

### **Puncak gunung es**

Isu mahar politik di [Pilkada](#) Jawa Timur merupakan sebuah puncak dari gunung es. Selama ini, banyak kandidat menganggap mahar sebagai sesuatu yang sudah lazim jika ingin berlaga di [pilkada](#).

Tidak sedikit bakal kandidat sudah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan tiket partai, namun sering kali surat rekomendasi yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang.

Mereka hanya bisa diam, lalu menganggap semuanya sebagai risiko pencalonan. Lebih dari itu, mereka tentunya juga tidak terlalu yakin untuk memberanikan diri beradu kuat melawan penguasa partai karena akan memperlebar kemungkinan urusan akan diperpanjang.

Dalam kasus La Nyalla Mattaliti versus Prabowo, komunikasi yang tadinya hanya dilakukan "setengah kamar", lalu tiba-tiba menjalar ke ruang publik.

Tensi politik nasional pun ikut memanas karena ternyata satu per satu kandidat yang sudah dikecewakan oleh masalah mahar politik terpancing untuk ikut bicara.

Benar saja, tidak lama setelah nyanyian La Nyalla, isu mahar politik yang melibatkan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PAN (Partai Amanat Nasional) di Pilkada Kota Cirebon juga ikut terkuak. Nilai mahar yang mencapai angka miliaran rupiah disebut-sebut sebagai syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi.

Baca juga : [PKS Bantah Minta Mahar Politik ke Siswandi-Euis untuk Pilkada Cirebon](#)

Jelang penetapan kandidat oleh KPU, isu mahar politik bisa saja kembali muncul. Kegaduhan politik ini pun berpotensi mendelegitimasi tokoh-tokoh yang menjadi sasaran tembak dari isu tersebut.

### **Unjuk kekuatan elite lokal**

Jawa Timur adalah panggung pertarungan utama di Pemilu 2019. Pemilihnya merupakan terbesar kedua di Indonesia, setelah Jawa Barat. Apa pun yang terjadi di sana tentu akan menjadi sorotan nasional.

Hipotesis kedua, La Nyalla ingin memperlihatkan kepada petinggi partai politik, bahwa kekuatannya tidak main-main. Oleh karena itu, isu mahar pun menjadi momentum untuk unjuk gigi di depan elite nasional.

Selain itu, isu tersebut membuat barisan pendukung La Nyalla di tingkat lokal juga ikut terkonsolidasi dengan sendirinya.

Tak hanya itu, perlawanan La Nyalla juga merupakan sinyal kepada elite nasional agar tidak menganggap remeh kekuatan penguasa lokal.

Meski cakupan pengaruhnya terbatas, manuver elite lokal ternyata dapat memberi dampak keributan di tingkat nasional. Apalagi, elite lokal tersebut memang sudah memiliki reputasi di tingkat nasional, layaknya La Nyalla.

Selain itu, La Nyalla juga ingin mendemonstrasikan mesin politiknya kepada kandidat-kandidat yang akan bertarung di Jawa Timur. Jika isu mahar ini mampu membangkitkan simpati publik, bukan tidak mungkin dukungan La Nyalla menjadi penting untuk memenangi Pilkada Jatim.

### **Berputar haluan**

Hipotesis ketiga, isu mahar politik juga bisa digunakan La Nyalla untuk bertukar haluan. Kegaduhan tersebut menjadi tanda putus kontrak dengan gerbong Prabowo Subianto.

Dalam gerbong sekarang, La Nyalla merasa memiliki kontribusi besar, salah satunya ia mengklaim berperan besar dalam kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta.

Lawan-lawan politik mantan Danjen Kopassus tersebut tentu sangat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa La Nyalla jelang 2019 nanti. Sebagaimana ungkapan orang bijak, *the enemy of your enemy is your friend*.

Isu mahar ini merupakan tanda-tanda akan terjadi eksodus berbagai tokoh politik dari satu poros ke poros yang lain jelang pemilu nasional.

Setelah melihat keberhasilan Anies Baswedan yang menyeberang dari poros pemerintah ke poros Prabowo di Pilkada DKI Jakarta, La Nyalla pun kini akan ikut angkat koper, entah ke mana dia akan berlabuh.

### **Lebih dari sekadar uang**

Mahar politik adalah tema yang lazim dibicarakan "setengah kamar" oleh para elite. Tidak ada cara yang valid untuk mengklarifikasinya. Transaksi mahar sangat tertutup, tentunya tidak ada kuitansi dan tanda terima.

Secara hukum, memang sangat sulit membuktikan keberadaan mahar politik. Namun, hikmah dari kegaduhan La Nyalla-Prabowo membuat publik mulai membicarakan tema ini secara terang-terangan.

Elite sudah terlalu lama menyembunyikan sesuatu yang sudah banyak diketahui publik. Semakin banyak urusan publik dibahas "setengah kamar", semakin darurat demokrasi kita.